

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, permasalahan publik yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks sehingga penanganannya memerlukan perhatian dari pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sudut pandang administrasi publik, apabila terjadi permasalahan publik di Indonesia maka intervensi pemerintah sangat diperlukan yakni dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan sebagai solusi atas permasalahan publik yang ada. Pernyataan sebelumnya pun didukung oleh pendapat Keban (2014) yang menjelaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan administrasi publik, pemerintah bertindak sebagai regulator yang berperan mengatur dan mengambil langkah atas permasalahan yang timbul melalui pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu dimensi dalam administrasi publik adalah dimensi manajemen. Ghofur (dalam Firdausijah dkk, 2023) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan yakni pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Guna mewujudkan tujuan organisasi publik, seorang manajer publik dapat mencari partner secara individu maupun instansi lain untuk membantu kelancaran berbagai macam pekerjaan yang akan dikerjakan oleh organisasi publik tersebut atau dengan kata lain dalam pelaksanaan manajemen publik diperlukan keterlibatan berbagai macam

stakeholders (Keban, 2014). Lebih lanjut, pelibatan berbagai macam *stakeholders* tersebut pun menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik karena dengan adanya peran aktif pihak di luar pemerintah seperti masyarakat (memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah) dan swasta (melaksanakan kerja sama dalam mendukung program utama pemerintah) maka diharapkan pelayanan publik akan berjalan lebih optimal.

Stakeholders merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh kegiatan maupun tujuan dari suatu organisasi (Freeman dalam Miles, 2012). Pentingnya keterlibatan *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu kegiatan didukung oleh pendapat Sandy (2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan *stakeholders* diperlukan pada sebuah implementasi kebijakan guna membantu menangani berbagai masalah yang muncul agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Selaras dengan hal tersebut, Wang & Aenis (2019) serta Sari (2021) pun menyatakan bahwa timbulnya interaksi dan kolaborasi antar *stakeholders* dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan serta mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada.

Analisis pengelompokan *stakeholders* diperlukan untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, peran, kepentingan, dan dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan suatu program (Widodo & Nugroho, 2021). Lebih lanjut, Masyhura dkk (2021) menyatakan bahwa *stakeholders* dikategorikan berperan baik apabila mereka telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, keberhasilan atas

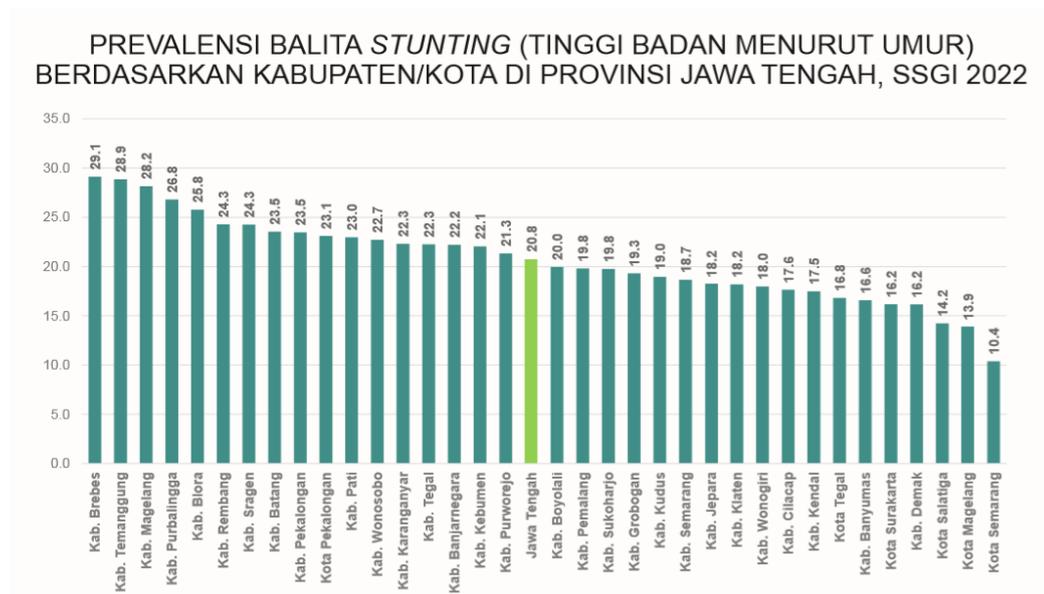
adanya keterlibatan dan peran dari berbagai macam *stakeholders* guna mengatasi masalah publik khususnya bidang kesehatan terlihat dalam penanganan masalah stunting pada salah satu daerah di Indonesia, yakni Kota Semarang.

Fenomena stunting adalah salah satu permasalahan pada bidang kesehatan yang utama untuk ditangani (Apriska dkk 2022; Rahayu dkk, 2022; Putri & Nurcahyanto,202; serta Herlianti; 2020). Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017), stunting merupakan kondisi gagalnya pertumbuhan anak balita akibat kekurangan gizi akut sehingga menyebabkan tinggi anak tersebut sangat pendek dibandingkan anak seusianya. Sementara itu menurut WHO (2023), stunting dapat didefinisikan sebagai gangguan tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi kronis dan infeksi yang terus terjadi sehingga tinggi badan anak berada di bawah standar rata-rata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan fenomena pertumbuhan tinggi badan balita yang tidak sesuai dengan standar usianya akibat kekurangan gizi kronis.

Permasalahan stunting di Indonesia diatasi dengan serius oleh pemerintah dengan adanya penetapan target penurunan angka prevalensi stunting nasional sebesar 14% yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 serta melibatkan peran dari berbagai macam *stakeholders*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017) menyatakan bahwa guna menindaklanjuti fenomena stunting di Indonesia, pemerintah pusat telah menentukan lima pilar pencegahan stunting yang terdiri dari (1) visi dan komitmen kepemimpinan; (2) kampanye dan komunikasi mengenai perubahan perilaku pada tingkat nasional; (3) konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pada tingkat pusat hingga desa;

(4) ketahanan pangan dan gizi; dan (5) monitoring dan evaluasi. Lebih lanjut, dalam rangka mencapai target dan realisasi kelima pilar tersebut diperlukan peran dari pemerintah pusat, daerah, desa, dan seluruh elemen pendukung lainnya melalui aksi nyata penyelenggaraan program dan kegiatan yang konvergen serta terintegrasi. Tidak hanya itu, strategi lain yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menetapkan 12 provinsi prioritas dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional.

Di antara 12 provinsi prioritas dalam program percepatan penurunan stunting di Indonesia, Jawa Tengah masuk sebagai salah satu daerah prioritas tersebut. Lebih lanjut, berikut merupakan capaian angka prevalensi stunting seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah (lihat Gambar-1).



Gambar 1 - Angka Prevalensi Balita Stunting Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Hasil SSGI, 2022

Sesuai data yang terdapat pada Gambar-1, terlihat bahwa daerah yang memiliki angka prevalensi balita stunting paling rendah di Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Pada tahun 2022, Kota Semarang memiliki capaian angka prevalensi balita stunting sebesar 10,4% yakni lebih rendah dari capaian angka prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah dan berhasil mencapai angka yang lebih baik dari target nasional yakni kurang dari 14%.

Kota Semarang adalah salah satu daerah yang dapat dikategorikan berhasil dalam menurunkan angka prevalensi balita stunting pada tahun 2022. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan angka prevalensi stunting dalam empat tahun terakhir (lihat Tabel-1).

Tabel 1 - Angka Prevalensi Balita Stunting di Kota Semarang Tahun 2019-2022

Tahun	Persentase	Sumber
2019	25,3%	SSGI tahun 2019
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	21,3%	SSGI tahun 2021
2022	10,4%	SSGI tahun 2022

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023

Berdasarkan data pada Tabel-1, terlihat bahwa Kota Semarang terus mengalami penurunan angka prevalensi stunting yang semula mencapai angka 25,3% pada 2019 menjadi 10,4% pada 2022. Dasar dari upaya penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang

Percepatan Penurunan Stunting serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang. Pada beberapa peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua jenis intervensi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting, yaitu intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik difokuskan pada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan, berkaitan dengan sektor kesehatan, serta memiliki jangka waktu yang pendek. Sementara itu, intervensi gizi sensitif diperuntukkan bagi masyarakat umum melalui beragam kegiatan di luar sektor kesehatan.

Lebih lanjut, menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang, sasaran dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yakni terdiri dari anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan remaja. Tidak hanya itu, di Kota Semarang pun terdapat 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang terintegrasi, yakni (1) melakukan analisa situasi; (2) merencanakan kegiatan; (3) rebug stunting; (4) terdapat Perwal kewenangan desa/kelurahan; (5) melaksanakan pembinaan bagi kader pembangunan masyarakat; (6) melakukan manajemen data; (7) melakukan pengukuran dan publikasi stunting; serta (8) melakukan review kinerja setiap tahun.

Keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang dipengaruhi oleh adanya keterlibatan antar *stakeholders* terkait. Pernyataan sebelumnya juga didukung oleh informasi yang berdasar dari laman resmi semarangkota.go.id (2023) dengan judul artikel “Ita Apresiasi Peran Kodim dalam

Penanganan Stunting di Kota Semarang”, yang menjelaskan bahwa keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang tidak terlepas dari peran para *stakeholder* yang terlibat, baik dari pemerintah, organisasi perangkat daerah maupun lembaga kemasyarakatan terkait. Lebih lanjut, sebagaimana tertuang dalam dasar peraturan penanganan stunting di Kota Semarang, yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting; serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang dijelaskan bahwa pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari berbagai macam *stakeholders* mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan diperlukan dan berfungsi untuk menciptakan koordinasi penyelenggaraan program percepatan penanganan stunting secara lebih optimal, termasuk Kota Semarang pun telah membentuk TPPS tersebut.

Keberhasilan Kota Semarang dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Semarang menarik untuk dianalisis lebih lanjut utamanya terkait dengan peran *stakeholders* yang terlibat. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung terkait dengan pentingnya peran *stakeholders* khususnya dalam penanganan stunting. Penelitian yang dilakukan oleh Herlianti (2020), Lailia dkk (2021), dan Rosalia et al. (2022) memiliki kemiripan hasil analisis yang menyatakan bahwa keterlibatan berbagai macam *stakeholders* sangat diperlukan dalam program penanganan stunting di beberapa daerah. Lebih lanjut, berdasarkan analisis peran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

pencapaian tujuan dari upaya penanganan stunting tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan serta komitmen dari LSM, sektor privat, masyarakat dan berbagai institusi terkait lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Purbani dkk (2019) pun menyatakan bahwa dukungan dan komitmen lintas *stakeholders* dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan kesinambungan dari pelaksanaan suatu program kegiatan.

Tidak hanya dilakukan pada bidang kesehatan, penelitian mengenai peran *stakeholders* juga dilakukan pada bidang kehidupan lainnya. Pada bidang lingkungan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisliatanto et al (2021) dan Subhan dkk (2022) menyatakan bahwa diperlukan peran *stakeholder* utama dalam pelaksanaan program maupun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yakni pemerintah serta *stakeholder* pendukungnya berasal dari sektor privat, dan masyarakat. Tidak hanya itu, analisis terkait peran *stakeholder* juga dilakukan pada bidang pariwisata. Hasil penelitian oleh Lestari et al (2020), Destiana dkk (2020), dan Hikmah dkk (2020) sepakat menyatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan kerja sama dan keterlibatan peran dari berbagai macam *stakeholders* untuk membantu pencapaian tujuan pariwisata yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai macam pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keterlibatan, komitmen, dan dukungan dari setiap *stakeholder* yang terlibat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program maupun kebijakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan serta mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, analisis terkait peran

stakeholders dalam implementasi program atau kebijakan pada berbagai bidang kehidupan penting dilakukan guna membantu memetakan peran setiap *stakeholder* sehingga dapat meminimalisasi adanya tumpang tindih tugas dan fungsi serta mereka dapat menjalankan perannya masing-masing secara lebih optimal.

Dengan demikian, berdasar pada berbagai uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan analisis mengenai peran *stakeholders* guna menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimana peran *stakeholders* dalam keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang?”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.
2. Menganalisis peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua jenis kegunaan yang diberikan dari pelaksanaan penelitian ini, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya manajemen publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisis peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kedepannya.

2) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta keinginan peneliti lain untuk melakukan riset lebih lanjut.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan topik-topiknya memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Penulisan penelitian terdahulu berfungsi untuk menjelaskan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan bukan merupakan bentuk plagiarisme dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terdiri dari artikel yang berasal dari berbagai macam jurnal tertentu.

Tabel 2 – Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Analisis Stakeholders Bidang Kesehatan			
1.	Purbani, Ratna K dkk / Analisis <i>Stakeholder</i> dalam Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Grobogan (2019)	Mendeskripsikan kegiatan perencanaan strategis daerah dalam penanggulangan HIV/AIDS melalui analisis <i>stakeholders</i> di Kabupaten Grobogan.	Keberlanjutan program penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan bergantung pada komitmen politik dan dukungan dari para pihak yang terlibat. Pihak-pihak ikut serta dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan terdiri dari (1) <i>stakeholders</i> primer yakni dinas kesehatan, VCT rumah sakit, KPAD, puskesmas, DP3AKB, LSM, tenaga kesehatan beserta kadernya, dan kelompok sasaran; (2) <i>stakeholders</i> sekunder meliputi kepolisian, Dinas Sosial, Disnakertrans, Kemenag, Dinas Pendidikan, dan berbagai macam OPD terkait lainnya; (3) <i>stakeholders</i> kunci terdiri dari bupati, TAPD level atas, DPRD, kepala dinas, serta tim perencana pencegahan dan penanggulangan penyakit. Lebih lanjut, demi mewujudkan upaya integrasi program penanggulangan HIV AIDS diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik oleh seluruh <i>stakeholders</i> yang terlibat.
2.	Herlianti, Leli / <i>Collaboration of Actors in The Network in Stunting Prevention Program in Bulukumba District</i> (2020)	Menganalisis kolaborasi aktor dalam jaringan dalam program pencegahan stunting di Kabupaten Bulukumba.	Kolaborasi antar <i>stakeholders</i> diperlukan untuk memecahkan permasalahan stunting di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, kolaborasi lintas sektor yang efektif serta didukung oleh komitmen <i>stakeholders</i> yang tinggi dapat membantu keberhasilan implementasi program pencegahan stunting. Selanjutnya, aktor yang berperan dan tergabung dalam tim penanggulangan stunting di Kabupaten Bulukumba antara lain terdiri dari Dinas Kesehatan, Bappeda, BKKBN dan UPTD PPA, dan lain-lain. Kolaborasi antar aktor dilakukan melalui dialog tatap muka (kegiatan

			konsultasi stunting) serta kegiatan tersebut pun dituangkan dalam MOU yang bersisi tentang kesetaraan data stunting serta komitmen aktor dalam program pencegahan stunting.
3.	Lailia, Isro' dkk / Peran <i>Stakeholders</i> dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang (2021)	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif di Kota Semarang serta melakukan analisis atas peran yang dimiliki.	Pada implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang, <i>stakeholder</i> memainkan peran penting guna mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Terdapat berbagai macam <i>stakeholders</i> yang ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain yaitu Dinas Kesehatan, Disdalduk dan KB, DP3A, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Puskesmas, Posyandu, swasta, dan lain sebagainya. Para pemangku kepentingan melaksanakan peran yang terbagi menjadi <i>policy creator</i> , koordinator, implementor, fasilitator, dan akselerator. Selain keterlibatan antar aktor, beberapa faktor lain yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah hubungan antar organisasi, kondisi lingkungan, karakteristik organisasi dan sumber daya.
4.	Rosalia, Feni et al. / <i>Actors Network of Stunting Prevention Program in Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia</i> (2022)	Menganalisis jaringan aktor yang terlibat dalam program pencegahan stunting di Kota Bandar Lampung.	Stunting merupakan masalah kesehatan yang serius untuk ditangani, terlebih di Provinsi Lampung. Berkaitan dengan hal tersebut, kolaborasi dan jaringan aktor dianggap penting untuk mengatasi permasalahan stunting. Jaringan aktor yang terjadi dalam pencegahan stunting di Kota Bandar Lampung terdiri dari aktor individu maupun institusi. Lebih lanjut, petugas gizi dan bidan di tingkat Puskesmas adalah aktor yang berpengaruh lebih. Selain itu, aktor lain yang terlibat dalam jaringan ini antara lain pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, kader posyandu, dan puskesmas keliling.
Analisis Stakeholders Bidang Lingkungan			

5.	Wang, Jue and Thomas Aenis / Stakeholder Analysis in Support of Sustainable Land Management: Experiences from Southwest China (2019)	Menganalisis <i>stakeholder</i> dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan penggunaan lahan bersama.	Analisis <i>stakeholders</i> dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan atas permasalahan penggunaan lahan bersama berkelanjutan di China Barat Daya. Tidak hanya itu, analisis <i>stakeholders</i> juga dapat membantu menghasilkan keputusan yang efektif, mengetahui harapan dan kepentingan para aktor, serta mengetahui keterkaitan antar aktor yang terlibat. Terdapat tiga kelompok kepentingan yang berperan dalam program pengelolaan lahan daerah di China Barat Daya yakni: 1) Pengambil keputusan daerah (pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan perusahaan swasta) sebagai <i>key experts</i> ; 2) Petani sebagai <i>directs user</i> ; 3) Aktor di tingkat provinsi. Hasil interaksi dan kolaborasi berbagai macam aktor yang terlibat antara lain memberikan strategi masa depan, konsep perlindungan air, dan menciptakan teknik khusus “tumpang sari” dalam pengelolaan lahan berkelanjutan.
6.	Hidayat, Nurhuda Candra dkk / Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember) (2020)	Menganalisis <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kabupaten Jember.	Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Jember yakni terdiri dari <i>stakeholder</i> primer, sekunder dan kunci. Selanjutnya, peran <i>stakeholder</i> yang terlibat terbagi menjadi <i>key player</i> , <i>context setters</i> , <i>subjects</i> dan <i>crowd</i> . Hubungan yang dimiliki antar <i>stakeholder</i> berjalan sangat baik. Lebih lanjut, beberapa faktor pendukung timbulnya hubungan positif antar aktor yakni dipengaruhi oleh koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan secara efektif.
7.	Sandy, Oka Ferry / Analisis Peran Aktor dalam Implementasi	Mengidentifikasi dan menganalisis peran aktor dalam pelaksanaan	Pada pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo, pihak yang menjadi <i>key player</i> yakni BAPPEDA, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas

	Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo (2020)	pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah desa, serta USAID IUWASH PLUS. Beberapa faktor yang dibutuhkan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo, yaitu koordinasi, sinergi, dan komunikasi yang baik.
8.	Trisliatanto, Dimas Agung et al. / <i>Stakeholder Networking Analysis on Umbulan Water Supply Project: An Exploratory Study Combined with Meta-Analysis Identification Design</i> (2021)	Mengidentifikasi dan menganalisis jaringan antar pemangku kepentingan.	Pada pelaksanaan proyek pasokan air Umbulan diperlukan keterlibatan berbagai macam aktor dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. <i>Stakeholders</i> utama yang memiliki banyak jaringan dengan <i>stakeholder</i> lain dari berbagai tingkatan adalah: 1) Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur; 2) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur; 3) Perusahaan Meta Adhya Tirta Umbulan; 4) Direktur Perumda Air Bersih Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, <i>stakeholders</i> sekunder yang memiliki banyak jaringan adalah Kepala Desa Pleret. Tidak hanya itu, hasil dari analisis <i>stakeholders</i> ini membantu dalam proses pengambilan keputusan serta mengetahui kesamaan dan konflik yang mungkin terjadi antar <i>stakeholder</i> yang terlibat. Terakhir, kolaborasi dan koordinasi antar aktor yang tercipta dengan baik pun dapat membantu mewujudkan keberhasilan pelaksanaan proyek pasokan air Umbulan.
9.	Subhan dkk / Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak (2022)	Menguraikan <i>stakeholders</i> , peran, dan hubungan yang terjadi antar aktor pada program SIAC Hijau di Kabupaten SIAC.	Pemangku kepentingan pada pengelolaan SDA dalam program SIAC Hijau di Kabupaten Siak yang terbagi ke dalam tiga jenis yakni <i>stakeholder</i> kunci (BPBD dan DLH), <i>stakeholder</i> utama (Bappeda, Bupati dan Sedhago Siak), serta <i>stakeholder</i> pendukung (pihak konsesi dan masyarakat). Sementara itu, pemetaan peran <i>stakeholder</i> tersebut terbagi menjadi tiga jenis, meliputi <i>key players</i> (Bappeda, Bupati, BPBD, DLH dan Sedhago Siak), <i>crowd</i> (pihak konsesi), dan <i>subject</i> (masyarakat). Selain adanya keterlibatan peran berbagai <i>stakeholders</i> dalam

			pelaksanaan program SIAK Hijau, faktor pendukung keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut juga berasal dari tersedianya anggaran terpisah yang termuat dalam APBD Kabupaten Siak.
Analisis Stakeholders Bidang Pariwisata			
10.	Lestari, Asih Widi et al. / <i>Actor Network in Tourism Management Based on Sustainable Development (Case Study of Tourism Development in Batu)</i> (2020)	Menganalisis jaringan aktor pada pengelolaan pariwisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Kota Batu.	Jaringan aktor yang dibentuk pada pengelolaan pariwisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Kota Batu berfungsi untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang berpengaruh buruk bagi pembangunan pariwisata. Jaringan aktor tersebut terdiri dari aktor dalam dan luar pemerintahan. Aktor dalam pemerintahan terbagi lagi menjadi dua yaitu aktor utama dan sekunder. Akibat belum optimalnya peran aktor dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan, pemerintah disarankan untuk menguatkan peran aktor utama, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan wadah “Masyarakat Sadar Lingkungan” sebagai agen pengendali, dan memperluas kerja sama dengan akademisi khususnya dalam kerjasama pengkajian lingkungan.
11.	Destiana, Riska dkk / <i>Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau</i> (2020)	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> , menganalisis peran dan hubungan antar aktor yang terlibat serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya.	Pengembangan pariwisata halal di Pulau Penyengat menerapkan konsep pentahelix serta <i>stakeholder</i> yang terlibat diklasifikasikan sebagai <i>stakeholders</i> sekunder, primer, dan kunci. Peran yang dilakukan oleh para aktor tersebut terbagi menjadi pembuat kebijakan, fasilitator, koordinator, implementor, serta akselerator. Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata halal adalah nilai dan komunikasi. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah kebijakan dan kepercayaan.
12.	Hikmah, Nurul dkk / <i>Identification and Role of Stakeholders in</i>	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang terlibat	Kolaborasi antar <i>stakeholder</i> diperlukan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. <i>Stakeholders</i> utama dalam pengembangan

	<i>Ecotourism Development in Indonesia (2020)</i>	dan perannya dalam pengembangan ekowisata.	ekowisata di Indonesia terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan ekowisata di Indonesia yakni meliputi: 1) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan; 2) Swasta sebagai penyedia dana; dan 3) Masyarakat yang tergabung dalam komunitas berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat.
Analisis Stakeholders Bidang Sosial			
13.	Widodo & Nugroho / Peran <i>Stakeholder</i> dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana: Studi Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi (2021)	Mengetahui pihak-pihak yang terlibat meliputi peran, kepentingan, dan dampak yang ditimbulkan dari dilaksakannya program kebijakan tersebut.	Keterlibatan aktif para <i>stakeholders</i> dan komitmen yang tinggi berpengaruh dalam membantu mewujudkan keberhasilan Desa Jambewangi sebagai Kampung KB percontohan. <i>Stakeholders</i> yang berperan dalam implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana di Desa Jambewangi, yakni Bupati sebagai <i>context setter</i> ; DPPKB dan Penyuluh KB serta perwakilan BKKBN Jawa Timur sebagai <i>key players</i> ; Kader kampung KB dan masyarakat, sebagai <i>subject</i> ; Disperinpangan dan Disperta sebagai <i>crowd</i> . Lebih lanjut, komitmen para <i>stakeholders</i> pun ditunjukkan melalui berbagai macam bentuk dukungan mulai dari finansial, sumber daya fisik, serta hasil-hasil pemikiran <i>stakeholders</i> dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
14.	Masyhurah dkk / Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang (2021)	Menganalisis peran <i>stakeholders</i> serta mengetahui faktor penghambat pada pelaksanaan upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan pada anak.	Berbagai pihak yang terlibat pada upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan anak di Kota Semarang memiliki peran masing-masing dalam perlindungan anak dan reintegrasi sosial, yakni meliputi (1) DP3A berperan sebagai pembuat kebijakan, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator; (2) PPT kecamatan, PPT SERUNI, serta Pos JPPA memiliki peran sebagai koordinator, implementor, fasilitator, dan akselerator; (3) OPD, rumah sakit, akademisi, RDRM, dan Bhabinkamtibnas memiliki

			peran sebagai fasilitator dan akselerator. Perlunya kerja sama yang lebih luas dengan berbagai macam aktor dan membuat regulasi baru yang lebih detail dapat digunakan untuk mengatasi faktor yang menghambat reintegrasi sosial kasus kekerasan anak.
15.	Sari, Yunita Ratna / Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta (2021)	Memaparkan peran <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam upaya mewujudkan kota layak anak di Kota Surakarta.	Tiga kelompok <i>stakeholder</i> yang terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam menciptakan kota layak anak di Surakarta, meliputi <i>stakeholders</i> kunci yakni terdiri dari walikota, DPRD, serta Bapermas PP, PA, dan KB; <i>stakeholders</i> primer yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, dan Dinsos; serta <i>stakeholders</i> sekunder yakni akademisi, LSM Seroja, dan sektor usaha. Selanjutnya, dalam menciptakan kota layak anak juga dibutuhkan komitmen serta koordinasi antar <i>stakeholders</i> . Sementara itu, ego sektoral perlu dihindari karena dapat berpengaruh buruk bagi keberlangsungan kerja sama antar <i>stakeholders</i> yang nantinya pun akan menghambat pencapaian tujuan bersama.

Sumber: Diolah dari berbagai jurnal, 2023

Berdasarkan data dari Tabel 4 – Penelitian Terdahulu, dapat diketahui bahwa analisis *stakeholders* dilaksanakan guna mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan, yakni meliputi pembahasan mengenai peran, kepentingan, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya keterlibatan antar *stakeholders* tersebut. Keterlibatan *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu kebijakan berfungsi untuk mendukung kelancaran kegiatan pengambilan keputusan melalui penyaluran ide dan pemikiran mereka. Umumnya, para *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan terdiri atas tiga pilar utama *good governance*, yakni (1) pemerintah; (2) sektor privat; dan (3) masyarakat. Tidak hanya itu, pada beberapa penelitian, media dan komunitas juga ikut berperan dalam membantu mewujudkan tujuan kebijakan.

Beberapa hal yang berpengaruh dalam mewujudkan keberhasilan kerja sama antar *stakeholders* dalam implementasi kebijakan, meliputi (1) koordinasi; (2) komunikasi; (3) sinergi; (4) komitmen; dan (5) saling mengakui kehadiran antar *stakeholders* yang terlibat. Apabila beberapa hal tersebut tidak dilakukan secara optimal maka dikhawatirkan akan timbul permasalahan dalam implementasi kebijakan seperti pelaksanaannya menjadi tidak terintegrasi dan tidak berjalan dengan baik. Lebih lanjut, faktor sumber daya manusia dan sumber daya keuangan juga memiliki peran penting pada implementasi kebijakan. Kualitas Sumber daya manusia yang baik diperlukan karena mereka menjadi aktor pelaksana utama dalam mewujudkan keberhasilan tujuan kebijakan. Sementara itu, sumber daya keuangan juga berperan penting dalam hal pembiayaan karena apabila tidak terdapat anggaran

dana dalam penyelenggaraan suatu kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan dan hanya menjadi angan-angan saja.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni fokus penelitian yang diambil belum pernah diteliti sebelumnya. Contoh berbagai penelitian terdahulu yang dimaksud memiliki pembahasan mengenai analisis *stakeholders* dalam penanggulangan HIV/AIDS (Purbani dkk, 2019), kolaborasi dan jaringan antar *stakeholder* dalam penanganan stunting di Indonesia (Herlianti, 2019; Rosalia, 2022), peran *stakeholders* dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif (Lailia dkk, 2021), analisis *stakeholders* pada bidang lingkungan (Wang & Aenis, 2019; Hidayat, 2020; Sandy, 2020; Trisliatanto, 2021; Subhan dkk, 2022), analisis *stakeholders* pada bidang pariwisata (Lestari et. al, 2020; Destiana dkk, 2020; Hikmah dkk, 2020) serta peran *stakeholders* pada bidang sosial (Widodo & Nugroho, 2021; Masyhurah dkk, 2021; Sari, 2021). Dari berbagai macam penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan pembahasan yang spesifik mengenai analisis peran *stakeholders* dalam keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Dengan demikian, diharapkan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan kontribusi sebagai informasi akademis khususnya mengenai peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang serta dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan perbaikan apabila masih ditemukan hambatan maupun kekurangan dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting tersebut.

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi apabila dilihat dari sudut pandang pemikiran dapat diartikan sebagai bentuk jaringan pemikiran yang tidak memiliki batasan tertentu kemudian digunakan dalam proses mencapai tujuan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia (Makmur & Thahier, 2016). Lebih lanjut, Herbert A. Simon (dalam Indradi, 2016) menjelaskan bahwa administrasi merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok manusia. Dengan demikian, berdasarkan pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia secara bersama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Sugandi (2011) menjelaskan bahwa kata “publik” adalah kata serapan dari bahasa Inggris “*public*” yang memiliki arti dan identik dengan masyarakat.

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses dengan melibatkan sumber daya dan pegawai yang kemudian dikoordinasikan untuk merencanakan hingga mengelola berbagai kebijakan publik. Lebih lanjut, mereka pun menjelaskan bahwa tujuan administrasi publik adalah membantu mengatasi berbagai masalah publik melalui penyempurnaan organisasi, keuangan, maupun sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Harmon & Mayer (2014) menjelaskan bahwa administrasi publik membahas terkait dengan berbagai macam keputusan yang mempengaruhi kehidupan rakyat, keputusan yang bersifat publik, dan keputusan yang menggunakan fasilitas publik.

Thoha (dalam Pasolong, 2019) menyatakan bahwa orientasi administrasi publik saat ini memiliki arah pada kekuasaan dan kepentingan rakyat karena lebih menekankan pada program yang memiliki orientasi pada kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, eksistensi dari administrasi publik tidak menjadi suatu gambaran saja, tetapi akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa administrasi publik sekarang lebih menekankan pada keikutsertaan publik dalam pencapaian tujuan bersama.

Dengan demikian, administrasi publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh banyak pihak guna mewujudkan tujuan bersama. Lebih dari itu, saat ini orientasi administrasi publik adalah kepentingan masyarakat luas sehingga diperlukan peranan publik dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Kuhn (dalam Pasolong, 2019) menjelaskan bahwa paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang, metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dijadikan pedoman dalam kurun waktu tertentu. Apabila suatu paradigma mengalami krisis maka kepercayaan atas pemikiran tersebut mulai berkurang sehingga masyarakat akan mencari pemikiran baru yang lebih sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Hubungan krisis tersebut dengan perkembangan ilmu administrasi publik yakni dapat memunculkan adanya pergantian pemikiran yang lebih baru. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban,

2014) terdapat enam paradigma administrasi publik yang telah berkembang dengan penjelasan sebagai berikut.

Paradigma 1 (1900 - 1926) adalah paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Ahli yang terkenal dari paradigma ini adalah J. Goodnow dan White. Cara pandang ini hanya berfokus pada aspek lokus saja yaitu birokrasi pemerintah, sedangkan fokus yang perlu untuk dikembangkan tidak dijelaskan secara lebih rinci.

Paradigma 2 (1927 - 1937) adalah paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh yang terkenal adalah Gullick & Urwick serta Willoughby dan pemikiran mereka dipengaruhi oleh beberapa ahli manajemen klasik yakni Taylor dan Fayol. Mereka mengemukakan bahwa prinsip administrasi publik dijelaskan dalam suatu konsep yang bernama POSDCORB dan memiliki sifat yang universal.

Paradigma 3 (1950 - 1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Salah satu tokohnya adalah Morstein-Marx yang mengemukakan bahwa tidak mungkin politik dan administrasi dapat dipisahkan. Dalam hal ini, prinsip administrasi administrasi negara akan berlaku secara universal dimana pun itu. Lokus dari pemikiran ini adalah birokrasi pemerintahan. Pada masa ini, terjadi krisis identitas dari administrasi publik akibat peran dominan ilmu politik dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Paradigma 4 (1956 - 1970) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Pada kondisi ini, berbagai prinsip manajemen terus dikembangkan secara lebih detail. Beberapa fokus pemikiran ini meliputi analisis

manajemen, perilaku organisasi, analisis sistem, riset operasi, penerapan teknologi modern dan lain sebagainya.

Paradigma 5 (1970-sekarang) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pemikiran ini akhirnya mempunyai fokus dan lokus yang jelas. Fokus tersebut terdiri dari teori manajemen, organisasi dan kebijakan publik. Sementara itu, lokusnya terdiri dari berbagai kepentingan dan masalah publik.

Paradigma 6 (1990-sekarang) adalah paradigma yang disebut sebagai paradigma *Governance*. Paradigma ini merupakan paradigma terbaru dalam perkembangan ilmu administrasi publik. *Governance* merupakan sistem nilai, kelembagaan, dan kebijakan dengan berbagai urusan sosial, ekonomi dan politik yang dikelola melalui kerja sama antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat (Keban, 2014). Proses dan mekanisme diutamakan dalam paradigma ini, dengan artian para masyarakat dan kelompok dapat mengetahui kepentingannya, melakukan mediasi atas perbedaan pendapat yang muncul, serta melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat berperan untuk menciptakan situasi hukum dan politik secara kondusif, sedangkan sektor swasta diharapkan dapat berperan terkait dengan penyediaan lapangan kerja, serta masyarakat dapat menyelenggarakan interaksi sosial secara sehat.

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam paradigma keenam atau paradigma *governance*. Paradigma tersebut memiliki fokus terhadap pentingnya keterlibatan *stakeholders* pada proses pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Paradigma ini menekankan tentang

adanya interaksi antara pemerintah, privat, dan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya itu, paradigma *governance* juga menjelaskan terkait perkembangan pemerintah ke arah yang baik atau *good governance* melalui penciptaan sinergi antar ketiga pihak tersebut dalam pelaksanaan kebijakan maupun program pemerintah.

1.5.4. Governance

Menurut UNDP (dalam Sedarmayanti & Aziz, 2020) *governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang menggunakan wewenang politik, ekonomi dan pemerintahan meliputi seluruh mekanisme, proses dan peran dari berbagai instansi terkait serta warga negara dan kelompok masyarakat dapat menggunakan hak hukum, berpendapat atas kepentingan mereka, melaksanakan kewajiban, dan mengakomodasi perbedaan yang timbul. Sementara itu, Dwiyanto (2018) menjelaskan bahwa fokus *governance* adalah pentingnya keterlibatan *stakeholders* pada proses pengambilan keputusan dan implementasinya karena masalah maupun tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sudah semakin kompleks. Lebih lanjut, Astuti dkk (2020) menyatakan bahwa adanya interaksi antar *stakeholders* yang terjadi dapat diketahui sebagai suatu usaha guna menciptakan keefektifan manajemen publik dengan cara pelibatan lintas sektor dalam konteks *governance*.

Terdapat beberapa karakter dari *governance* menurut Roderick A. W. Rhodes (1996), antara lain: (1) *Governance* memiliki makna yang luas dibandingkan *government* karena dalam pelaksanaannya melibatkan pemangku

kepentingan non-negara sehingga menciptakan hubungan saling bergantung antar organisasi; (2) Kebutuhan negosiasi dan pertukaran sumber daya merupakan latar belakang timbulnya interaksi antar pemangku kepentingan; (3) Akar dari *governance* adalah hubungan saling percaya dan adanya aturan yang mengikat dari kesepakatan dan negosiasi sebelumnya; (4) Memiliki derajat yang signifikan untuk lepas dari pemerintah.

Dewasa ini, dimensi *governance* dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Dwiyanto (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis dimensi *governance*, yakni (1) kelembagaan; (2) nilai; dan (3) proses, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Dimensi Kelembagaan, merupakan dimensi yang bertindak sebagai suatu sistem administrasi dengan mengikutsertakan berbagai macam pihak dari dalam dan luar pemerintah. Isu mengenai dimensi kelembagaan yang paling banyak dikaji adalah tentang mengidentifikasi maupun memetakan *stakeholders* yang terlibat pada suatu program atau kegiatan.
2. Dimensi Nilai, merupakan dimensi yang digunakan sebagai dasar dalam penggunaan kekuasaan. Dimensi nilai diketahui sebagai suatu prinsip perilaku yang sifatnya pribadi dalam diri individu atau kelompok saat berpikir atau melakukan sesuatu. Nilai dapat dibedakan menjadi dua yakni nilai substantif dan prosedural. Nilai substantif merupakan suatu pedoman yang menjadi pegangan individu dan biasanya diperoleh dari hasil pembelajaran. Sementara itu, nilai prosedural adalah nilai yang perlu dilatih dan diberikan kepada orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan *governance*,

pemerintah juga harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang telah ada dalam diri masyarakat guna mencari solusi atas permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat di suatu negara maupun daerah tertentu.

3. Dimensi Proses, merupakan dimensi yang menjelaskan tentang bagaimana lembaga pemerintahan memberikan respons atas berbagai permasalahan publik yang muncul. Proses merupakan penggambaran tentang urutan pelaksanaan kegiatan yang saling terkait dan secara bersamaan dapat mengubah masukan menjadi keluaran. Contoh proses dalam kebijakan publik yaitu mengidentifikasi permasalahan, menyusun agenda, merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan.

Berkaitan dengan jenis-jenis dimensi *governance* yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus penelitian yang dilakukan memiliki kaitan dengan dimensi kelembagaan karena penelitian ini mencoba untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, dimensi kelembagaan dalam *governance* atau sistem administrasi dengan pelibatan berbagai macam *stakeholders* baik dari pemerintah maupun luar pemerintah pun masuk ke dalam salah satu isu penting dalam *core* ilmu manajemen publik yang memiliki persamaan tujuan yakni meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat luas.

1.5.5. Manajemen Publik

Westra dkk (dalam Indradi, 2016) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu perbuatan dengan menggerakkan sekelompok orang dan

menggunakan fasilitas dalam pelaksanaan kerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Satibi (2012), pengelolaan berbagai sektor publik oleh instansi pemerintah dengan memperhatikan aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi terhadap sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan disebut sebagai manajemen publik. Berkaitan dengan hal itu, tugas pemerintahan yang paling utama yaitu menyediakan barang-barang publik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti contohnya yaitu dalam bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, keamanan, perlindungan tenaga kerja, dan sebagainya.

Keban (2014) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan suatu organisasi publik, pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor privat dalam melaksanakan kontrak kerja tertentu dan dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program yang membutuhkan partisipasi lebih dari masyarakat lokal. Pelibatan sektor privat dan masyarakat tersebut merupakan salah satu isu penting dalam dimensi manajemen publik. Peran pemerintah dalam kerja sama antar *stakeholder* tersebut disarankan dapat bertindak sebagai penentu kebijakan dan standar pelayanan, pemberi arahan, pemberdaya, serta fasilitator dalam perwujudan tujuan pelaksanaan program maupun pemberian layanan publik. Tidak hanya itu, Astuti dkk (2020) juga menjelaskan bahwa dengan melibatkan kerja sama lintas sektor sebagai respons terhadap penyelesaian berbagai macam masalah publik yang semakin kompleks merupakan salah satu upaya untuk mengefektifkan manajemen publik.

Berdasarkan berbagai pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya didapatkan bahwa manajemen publik merupakan proses pengelolaan dalam pencapaian tujuan melalui penggunaan sarana maupun prasarana yang tersedia, sumber dana, sumber daya serta melibatkan *stakeholders* dari berbagai sektor dalam rangka pencapaian tujuan bersama dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1.5.6. Stakeholders

Studi mengenai *stakeholder* atau pemangku kepentingan berawal dari studi ilmu manajemen dan administrasi bisnis yang kemudian mengalami perkembangan serta diterapkan dalam kajian keilmuan yang lebih luas, contohnya dalam ilmu politik dan kebijakan publik (Brugha & Varvasovszky dalam Astuti dkk, 2020).

Freeman (dalam Oktavia & Saharuddin, 2015) menyatakan bahwa *stakeholders* merupakan individu ataupun kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh tujuan dari suatu organisasi. Sementara itu, Wulandari (2020) menjelaskan bahwa *stakeholder* atau pemangku kepentingan merupakan kelompok yang sifatnya sangat luas dan beragam, dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berbeda. Lebih lanjut, Reed (dalam Santoso dkk, 2015) mengemukakan bahwa *stakeholders* merupakan seseorang maupun kelompok yang membawa maupun terkena dampak dari suatu program atau kebijakan yang sedang berjalan. Berdasarkan berbagai macam penjelasan mengenai *stakeholders* yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *stakeholders* dapat didefinisikan sebagai seorang individu atau kelompok yang dapat memberi maupun

menerima pengaruh serta membawa maupun terkena dampak dari suatu program maupun kebijakan.

Kaitannya dengan keberadaan suatu program maupun kebijakan, keterlibatan *stakeholders* sangat diperlukan dalam organisasi publik dalam rangka memperlancar kegiatan pencapaian tujuan (Yuniningsih & Suwitri, 2021). *Stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang saling bergantung baik berasal dari pemerintah maupun non pemerintah serta berperan dalam penentu keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan (Ramadani, 2022). Lebih lanjut, Ramadani (2022) pun menjelaskan bahwa ketergantungan tersebut timbul karena dalam menangani masalah publik yang semakin kompleks diperlukan kerja sama antar *stakeholders* dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing guna mencapai tujuan bersama.

Stoney & Winstanley (dalam Astuti dkk, 2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pencapaian tujuan perlu untuk dilakukan klarifikasi posisi dan kepentingan *stakeholders* sehingga tidak terjadi tumpang tindih kedudukan maupun peran dari *stakeholders* yang terlibat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka menghindari adanya tumpang tindih kedudukan maupun peran penting untuk dilakukan analisis *stakeholders*. Analisis *stakeholders* merupakan kegiatan pengumpulan informasi terkait dengan pihak-pihak terlibat, kepentingan, peran, serta dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan dari suatu program maupun kebijakan (Widodo & Nugroho, 2021). Lebih lanjut, Reed (dalam Hidayat dkk, 2020) menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis *stakeholders* diperlukan tiga tahapan yang terdiri dari identifikasi atau pengkategorian *stakeholder*,

pengelompokan peran *stakeholders*, dan mencari hubungan antar *stakeholders* yang terlibat.

Maryono et al. (dalam Yuniningsih & Suwitri, 2021; Hidayat dkk, 2020) menjelaskan bahwa kategori *stakeholder* dapat diidentifikasi ke dalam tiga jenis, yakni:

1. *Stakeholder* Primer

Stakeholder primer adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. Keberadaan dari *stakeholder* primer dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Maryono (dalam Handayani & Warsono, 2017) pun menjelaskan bahwa *stakeholder* primer merupakan sekelompok orang yang mendapatkan dampak secara langsung dari pelaksanaan kebijakan publik, baik itu dampak positif maupun negatif.

2. *Stakeholder* Sekunder

Stakeholder sekunder atau pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. Meskipun demikian, *stakeholder* sekunder mempunyai rasa kepedulian yang besar pada pengembangan program sehingga mereka ikut serta dalam memberikan masukan dan pengaruhnya dalam proses pengembangan tersebut. Tidak hanya itu, keberadaan *stakeholders* sekunder pun dapat dikatakan cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

3. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan sekaligus kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan suatu kebijakan. Umumnya, *stakeholder* jenis ini berasal dari unsur pemerintah yakni eksekutif maupun lembaga legislatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Astuti dkk (2020) menjelaskan bahwa peran merupakan suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika berada pada suatu posisi dalam struktur sosial. Pada pelaksanaan kegiatan administrasi publik, setiap *stakeholders* memiliki perannya masing-masing mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Lailia dkk, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, Sari (2021) menjelaskan bahwa peran yang dimiliki dan dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholder* berpengaruh pada pencapaian keberhasilan tujuan dari suatu kebijakan maupun program.

Peran *stakeholder* dapat dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* (Thompson dalam Sandy, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, Bryson (2003) menjelaskan bahwa peran *stakeholder* dibagi menjadi empat kategori yakni *Key Players*, *Context Setters*, *Subjects*, dan *Crowd*, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. *Key Players* (Pemain Kunci)

Key players atau pemain kunci adalah *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*power*) tinggi dalam kebijakan publik.

2. *Context Setter* (Pendukung)

Context setter atau pendukung merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan (*interest*) rendah tetapi memiliki tingkat pengaruh (*power*) tinggi dalam kebijakan publik.

3. *Subjects* (Subyek)

Subjects atau subyek merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan (*interest*) tinggi tetapi memiliki tingkat pengaruh (*power*) rendah dalam kebijakan publik.

4. *Crowd* (Pengikut Lain)

Crowd atau biasa disebut dengan pengikut lain merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*power*) rendah dalam kebijakan publik.

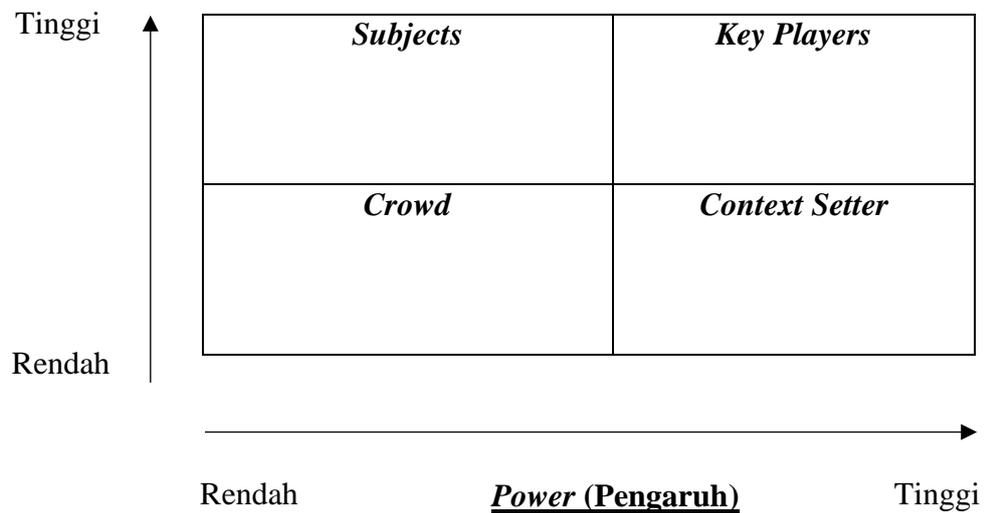
Menurut Eden & Ackermann (dalam Bryson, 2003; Nurfatriani dkk, 2015; Lailia, 2021), tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh dapat dilihat melalui beberapa aspek, yakni:

- 1) Tingkat kepentingan dapat dilihat berdasarkan harapan maupun aspirasi *stakeholder* terhadap suatu kebijakan, manfaat yang akan diperoleh *stakeholder* dari suatu kebijakan baik pada bidang ekonomi, sosial, maupun politik, dan upaya yang dilakukan *stakeholder* dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
- 2) Tingkat pengaruh *stakeholders* dapat dilihat berdasarkan kemampuan mempengaruhi *stakeholders* baik secara personal maupun dengan kekuasaan yang dimiliki, wewenang dari tahap perencanaan hingga evaluasi yang dimiliki oleh *stakeholders*, dan kontribusi fasilitas (barang fisik

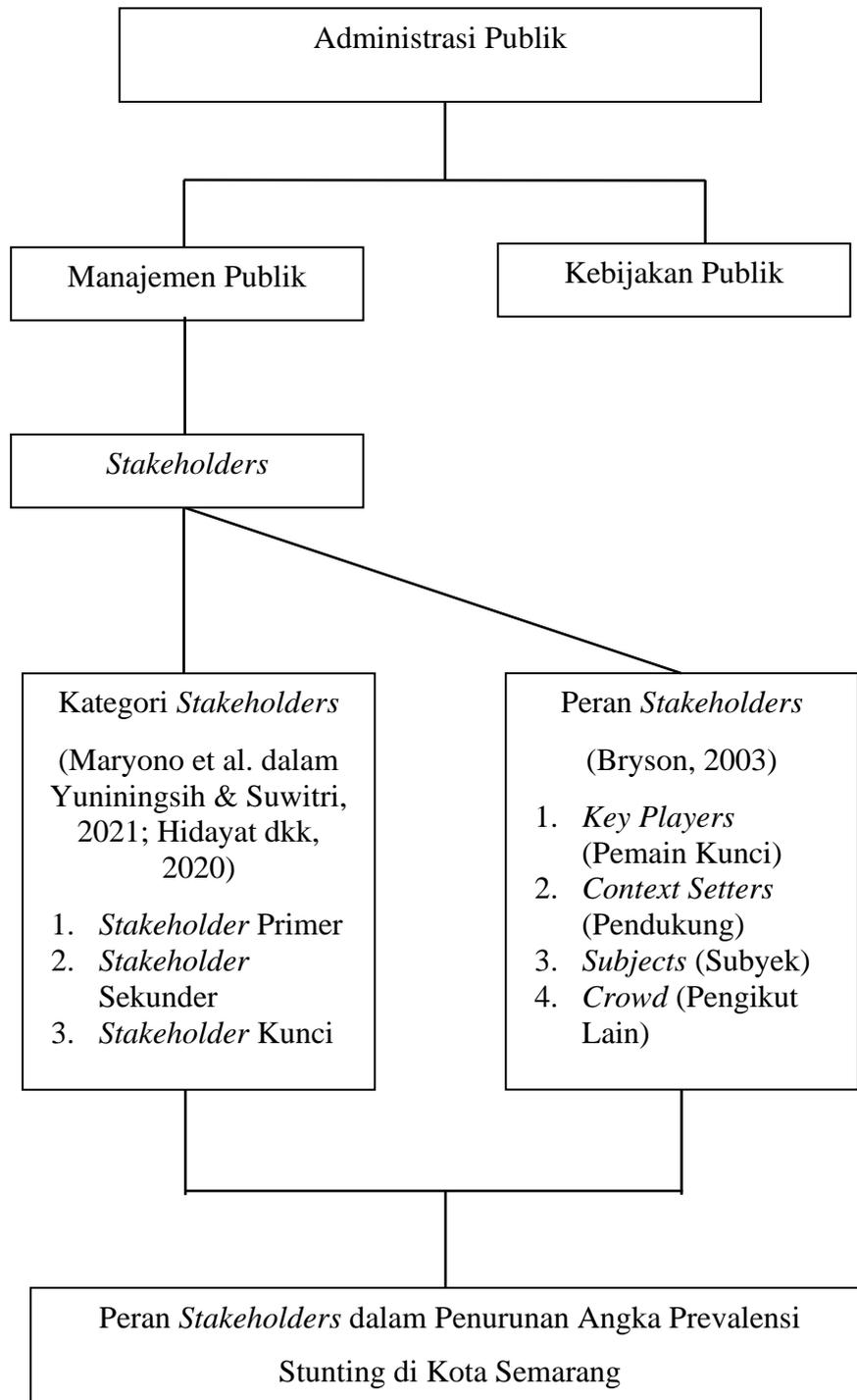
maupun dana) yang diberikan *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Matriks Analisis Peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Menurut Bryson (2003)

Interest
(Kepentingan)



1.6. Kerangka Pikir Teoritis



1.7. Operasionalisasi Konsep

Analisis peran *stakeholders* merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka mengetahui pengaruh, kepentingan, dan kekuatan pihak-pihak yang terlibat dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Analisis peran *stakeholders* tersebut dapat dilaksanakan melalui dua tahap yakni mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dan menganalisis peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

Pertama, *stakeholder* yang terlibat dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang diidentifikasi ke dalam tiga kategori, yakni:

- 1) **Stakeholder Primer** adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan secara langsung, keberadaannya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, dan merupakan kelompok yang terkena dampak langsung dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.
- 2) **Stakeholder Sekunder** adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Namun, *stakeholder* sekunder memiliki kepedulian yang besar sehingga mereka ikut memberikan masukan serta pengaruhnya terhadap pengembangan upaya tersebut. Tidak hanya itu, keberadaan *stakeholder* jenis ini pun cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan pada penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

- 3) **Stakeholder Kunci** adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan sekaligus kewenangan secara legal pada pengambilan keputusan dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

Kedua, analisis peran *stakeholder* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang dapat dilihat berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* tersebut. Terdapat empat jenis peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang, yaitu:

- 1) **Key Players** atau pemain kunci adalah *stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.
- 2) **Context Setters** atau pendukung merupakan *stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan rendah, tetapi memiliki pengaruh tinggi dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.
- 3) **Subject** atau subyek merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, tetapi memiliki pengaruh rendah dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.
- 4) **Crowd** atau pengikut lain, merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh rendah dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

Lebih lanjut, terdapat beberapa gejala yang dapat diamati untuk menganalisis tingkat kepentingan *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang, yaitu:

1) Harapan maupun aspirasi *stakeholders*

Merupakan harapan maupun aspirasi yang dimiliki oleh *stakeholders* terhadap suatu program maupun kegiatan.

2) Manfaat yang diperoleh *stakeholders*

Merupakan manfaat yang akan diperoleh *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu program maupun kegiatan. Manfaat tersebut meliputi pada bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

3) Upaya yang dilakukan *stakeholders*

Merupakan upaya yang dilakukan oleh *stakeholders* untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan program maupun kegiatan.

Sementara itu, tingkat pengaruh *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang dapat dianalisis menggunakan beberapa gejala, yakni:

1) Kemampuan *stakeholders* dalam memberikan pengaruh

Kemampuan memberikan pengaruh yang dimaksud adalah kemampuan *stakeholders* untuk mempengaruhi pihak lain baik secara personal maupun menggunakan kekuasaan yang dimiliki.

2) Wewenang yang dimiliki oleh *stakeholders*

Kewenangan yang dimiliki *stakeholders* meliputi dari tahap perencanaan hingga evaluasi dalam pelaksanaan suatu program maupun kegiatan.

3) Pemberian kontribusi fasilitas oleh *stakeholders*

Pemberian kontribusi fasilitas yang dimaksud adalah berupa barang fisik maupun dukungan dana dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.

Tabel 3 - Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan
<i>Kategori Stakeholders</i>	<i>Stakeholder Primer</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepentingan 2) Kewenangan dalam pengambilan keputusan 3) Dampak langsung yang diterima
	<i>Stakeholder Sekunder</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepentingan 2) Kewenangan dalam pengambilan keputusan
	<i>Stakeholder Kunci</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepentingan 2) Kewenangan dalam pengambilan keputusan
<i>Peran Stakeholders</i>	<i>Key Players (Pemain Kunci)</i>	<p>Tingkat Kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harapan dan aspirasi <i>stakeholders</i> 2) Manfaat bagi <i>stakeholders</i> 3) Upaya <i>stakeholders</i> <p>Tingkat Pengaruh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaruh <i>stakeholders</i> 2) Wewenang <i>stakeholders</i> 3) Kontribusi sumber daya yang diberikan
	<i>Context Setters (Pendukung)</i>	
	<i>Subjects (Subyek)</i>	
	<i>Crowd (Pengikut Lain)</i>	

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasar pada timbulnya fenomena keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Pada tahun 2022, Kota Semarang berhasil mencapai angka prevalensi stunting sebesar 10,4% dan capaian tersebut lebih baik dari target nasional serta merupakan angka prevalensi paling rendah jika dibandingkan dengan seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah. Keberhasilan tersebut pun tidak terlepas oleh keterlibatan *stakeholders* yang ikut berperan dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, muncul sebuah pertanyaan penelitian yakni **“Bagaimana peran *stakeholders* dalam keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang?”**.

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, timbul cabang pertanyaan yang lebih spesifik yakni meliputi identifikasi *stakeholders* yang terlibat dan pemetaan peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Dengan demikian, dengan adanya cabang pertanyaan yang menjadi rumusan masalah tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran yang dimiliki *stakeholders* dalam mewujudkan keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami serta memperoleh lebih banyak informasi dari suatu gejala sentral (Creswell dalam Raco, 2010). Lebih lanjut, untuk memahami mengenai gejala sentral, seorang peneliti dapat mewawancarai informan dengan cara mengajukan pertanyaan umum. Informasi yang diperoleh umumnya berupa kata-kata atau teks. Selanjutnya, data yang telah didapatkan akan dianalisis sehingga menghasilkan penggambaran atau deskripsi atas suatu fenomena. Selain itu, melalui metode ini, data yang telah diinterpretasikan dapat menghasilkan menghasilkan suatu pemikiran yang baru (Raco, 2010).

Priyono (2008) menjelaskan bahwa tipe penelitian berdasarkan tujuannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Penelitian Eksploratif

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih detail mengenai suatu gejala yang belum pernah ditemui atau meneliti suatu fenomena yang relatif baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ide dasar terkait fenomena baru dan memberikan pedoman bagi peneliti selanjutnya. Dengan demikian, melalui penelitian tersebut suatu permasalahan dapat dirumuskan dengan lebih rinci.

2. Penelitian Deskriptif

Penelitian dengan jenis ini berguna untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai suatu fenomena. Hasil penelitian tersebut umumnya berbentuk pola-pola atau tipologi tentang suatu fenomena tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme suatu proses dan menghadirkan sekelompok kategori atau pola. Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian ini seperti mendeskripsikan, melakukan pencatatan, menganalisis, dan melakukan interpretasi atas kondisi yang sedang terjadi.

3. Penelitian Eksplanatori

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan penjelasan mengenai alasan terjadinya suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan beberapa pola yang berbeda tetapi saling terkait serta pada akhirnya akan menggambarkan hubungan sebab akibat.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena menjelaskan siapa saja *stakeholders* yang terlibat dan bagaimana peran *stakeholders* tersebut dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Berdasarkan dengan hal tersebut, guna mendalami fenomena yang telah diambil, peneliti akan melakukan kegiatan seperti mendeskripsikan, menganalisis, dan melakukan interpretasi kondisi yang sedang terjadi sesuai dengan konsep penelitian kualitatif deskriptif.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian atau wilayah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang dipilih karena berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4% pada tahun 2022. Angka tersebut berhasil lebih baik dari target nasional dan termasuk angka yang paling rendah di Jawa Tengah. Selain pada tingkat kota, Kelurahan Kemijen (Kecamatan Semarang Timur) dan Kelurahan Randusari (Kecamatan Semarang Selatan) merupakan lokasi yang dipilih sebagai perwakilan situs penelitian dari seluruh wilayah Kota Semarang. Alasan pemilihan tersebut berdasar pada informasi Dinas Kesehatan Kota Semarang yang menjelaskan bahwa kedua kecamatan tersebut masuk dalam kategori 5 besar daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2022 sehingga intervensi spesifik dan sensitif masih dilaksanakan secara intensif oleh para *stakeholders* yang terlibat. Tidak hanya itu, kedua kecamatan tersebut dikatakan berhasil menangani stunting dengan baik karena termasuk 3 besar kecamatan dengan penurunan kasus stunting terbanyak pada 2022-Oktober 2023 dibandingkan dengan 5 besar lokasi yang memiliki angka prevalensi stunting tertinggi serta merupakan lokasi yang tergolong aktif dalam mewujudkan keberhasilan dari penanganan stunting sehingga penurunan kasus stunting di wilayah tersebut pun dapat tercapai secara bertahap.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian umumnya dapat disebut sebagai pihak yang dapat memberikan informasi atau data. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian

disebut sebagai informan. Subjek dalam penelitian yang dilakukan ditentukan secara *purposive sampling* dan apabila saat di lapangan ternyata membutuhkan informasi yang lebih dari sebelumnya maka informan lain akan didapatkan secara *snowball sampling*.

- 1) Teknik *purposive sampling*, merupakan teknik penentuan sampel melalui penilaian tertentu (Ahmad, 2015). Teknik penentuan menggunakan *purposive sampling* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penentuan informan sesuai dengan topik dan tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan.
- 2) Teknik *snowball sampling*, adalah teknik penentuan sampel yang semula dalam jumlah sedikit kemudian bertambah lebih banyak (Ahmad, 2015). Teknik *snowball sampling* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penentuan informan yang sifatnya bergulir sesuai dengan arahan dari informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada penelitian ini, informasi terkait *stakeholders* yang terlibat serta perannya dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang diperoleh dari berbagai pihak, yakni:

1. Dinas Kesehatan Kota Semarang;
2. Bappeda Kota Semarang;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
5. Posyandu;
6. Puskesmas;
7. Masyarakat.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Idrus (dalam Rahmadi, 2011) menjelaskan bahwa data dengan jenis kualitatif merupakan data yang berdasar pada kualitas objek penelitian, yakni ukuran data non angka dan serangkaian informasi secara verbal maupun non verbal yang diperoleh melalui informan guna menjelaskan peristiwa atau perilaku yang sedang menjadi fokus penelitian.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dengan jenis kualitatif dapat berbentuk tindakan maupun rangkaian kata dan selebihnya berupa tambahan data seperti dokumen pendukung yang masih terkait dengan topik penelitian (Lofland & Lofland dalam Moleong, 2017). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Azwar (2010) mengemukakan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut dapat berupa informasi, pernyataan, maupun tanggapan dari informan melalui kegiatan wawancara mendalam. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang memiliki informasi mengenai peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

2) Sumber Data Sekunder

Azwar (2010) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung melalui dokumentasi maupun laporan dari suatu objek penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang masih memiliki kaitan dengan topik peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Beberapa data sekunder yang digunakan, antara lain:

- a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah;
- b) Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang;
- c) Data BPS Indonesia;
- d) Data BPS Jawa Tengah;
- e) Dokumen Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tentang 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting);
- f) Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia;
- g) Artikel pada laman resmi Pemkot Semarang (semarangkota.go.id) mengenai inovasi program Rumah Pelita dan Rumah Sigap;
- h) Artikel pada laman resmi PPID Kota Semarang (berita.semarangkota.go.id) mengenai inovasi program CEMPAKA (Cegah Stunting Bersama Pengusaha Kota Semarang);
- i) Artikel jurnal maupun berita lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2016) menjelaskan bahwa wawancara merupakan kegiatan pemberian informasi melalui metode tanya jawab yang dilaksanakan oleh dua orang dalam rangka memperoleh pendapat maupun keterangan terkait suatu hal yang relevan dengan topik penelitian. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data melalui wawancara berguna untuk mengetahui berbagai macam hal yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi (Stainback dalam Sugiyono, 2016). Wawancara dapat dikatakan baik apabila dilakukan dengan pertemuan tatap muka atau melalui saluran telepon. Selanjutnya, apabila telah terdapat penetapan narasumber maka peneliti wajib untuk meminta kesediaan narasumber tersebut untuk melakukan wawancara dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan valid.

Sugiyono (2016) berpendapat bahwa data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara umumnya bias atau dengan kata lain data tersebut tidak akurat dan bersifat subjektif. Dengan demikian, untuk menghindari timbulnya data bias tersebut diperlukan sikap netral dan kemampuan peneliti dalam menjelaskan serta memberikan pertanyaan yang jelas kepada para narasumber terkait.

2) Observasi

Margono (dalam Rahmadi, 2011) menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan mengamati serta mencatat secara sistematis atas gejala

yang timbul pada objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan mengamati objek penelitian di tempat dan waktu terjadinya peristiwa disebut sebagai observasi secara langsung. Sementara itu, observasi yang dilakukan melalui perantara alat tertentu seperti film, video, dan rangkaian foto disebut observasi secara tidak langsung.

Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa studi dokumen atau pustaka merupakan pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data lainnya. Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data penelitian yang diperoleh melalui beragam jenis sumber bacaan seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah, serta berbagai literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Lebih lanjut, kegiatan studi pustaka berguna untuk membantu memberikan kredibilitas bagi hasil penelitian. Meskipun demikian, hal yang perlu dicermati bagi peneliti adalah tidak semua jenis dokumen mempunyai kredibilitas tinggi sehingga peneliti wajib untuk memilih dan memilah dokumen penunjang sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini meliputi transkrip wawancara dan studi pustaka. Miles et al (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga alur kegiatan dalam suatu kegiatan analisis dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Kondensasi Data

Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa pemadatan data melalui proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data yang diperoleh dari catatan saat kegiatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, maupun berbagai bahan pendukung lainnya.

2) Penyajian Data

Penyajian data dapat berbentuk deskripsi ringkas, bagan, hubungan antarkategori, dan lain sebagainya. Setelah disajikan, data akan terlihat dalam pola hubungan sehingga nantinya mudah dipahami.

3) Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dipaparkan sifatnya sementara dan nantinya dapat berganti menjadi kesimpulan yang kredibel jika ditemukan berbagai bukti pendukung saat kegiatan pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika sejak awal kesimpulan telah didukung oleh bukti yang valid serta konsisten maka kesimpulan tersebut telah bersifat kredibel.

1.9.8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini dibuktikan melalui uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi data. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa triangulasi merupakan kegiatan pengecekan data dari beragam sumber yang dilakukan dengan berbagai cara dan dalam waktu yang berbeda-beda. Lebih lanjut, Sugiyono (2016) juga membagi tiga jenis triangulasi, antara lain:

- 1) Triangulasi sumber, merupakan pengujian kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Selanjutnya, data yang telah diterima akan dianalisis guna menghasilkan suatu kesimpulan.
- 2) Triangulasi teknik, adalah cara pengujian kredibilitas melalui pengecekan data kepada informan yang sama dengan penggunaan teknik yang berbeda, seperti observasi, dokumentasi, maupun kuesioner. Jika perbedaan data ditemukan melalui teknik tersebut maka dapat dilakukan diskusi lanjutan dengan informan terkait guna memastikan kebenaran data. Meskipun demikian, perbedaan data tersebut juga kemungkinan bersifat benar karena dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang.
- 3) Triangulasi waktu, merupakan cara pengujian kredibilitas melalui pelaksanaan observasi, wawancara, atau teknik pengambilan data lainnya dalam waktu dan situasi berbeda. Jika perbedaan data ditemukan maka peneliti dapat melakukan triangulasi waktu secara berulang-ulang hingga menemukan kepastian data.

Dengan demikian, berdasarkan uraian berbagai jenis teknik triangulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk uji kredibilitas data. Nantinya, akan dilakukan pengecekan data dari satu narasumber dengan narasumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan atas hasil data yang diperoleh dengan dukungan bukti yang valid melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.